

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alfiah, Ratna Nurul. 2001. *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Basmanizar, 1997. *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003. Tim Penyusun Kamus dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Kolim, Noor. 2005. *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*, Pusdiklat Pegawai Depertemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukurn dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1 .35.PK.03. 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan